



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2023.

KESATU...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disusun sebagai pedoman bagi para pejabat/pegawai dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2023.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kabinet ini.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disusun dengan bertujuan:
1. terwujudnya arah Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2023 sesuai dengan Penajaman atas *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024; dan
 2. terwujudnya prioritas kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2023.
- KELIMA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sepanjang Triwulan I sampai dengan Triwulan III merupakan bagian dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Kabinet ini.
- KEENAM : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

KETUJUH:...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 71 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 OKTOBER 2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKASI GENERAL SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2023

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi
A. Mandatory														
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	20%	Monitoring tindak lanjut pengusulan jabatan fungsional baru	Dokumen	Hasil monitoring				1	1	Rp92.779.000	Biro SDMOT	Biro SDMOT
				Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dan unit-unit kerja terkait	Dokumen	Hasil koordinasi				1	1		Biro SDMOT	Biro SDMOT
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	100%	Menyusun rancangan perubahan kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	Dokumen	Rancangan perubahan kebijakan				1	1	Rp117.844.000	Biro SDMOT	Biro SDMOT
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.4	Penyusunan Kebijakan Internal Tata Kelola terkait Arsitektur SPBE	(Dokumen/kebijakan)	Jumlah kebijakan SPBE				1	1		Pusdatin	Pusdatin dan Biro SDMOT
				Finalisasi Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	(Dokumen/kebijakan)	Jumlah kebijakan tim SPBE			1		1		Pusdatin	Pusdatin dan Biro SDMOT
				Peningkatan tata kelola penyelenggaraan SPBE	(Dokumen/kebijakan)	Jumlah kebijakan tim SPBE			1		1		Pusdatin	Pusdatin dan Biro SDMOT
				Peningkatan penerapan Manajemen SPBE	(Dokumen/kebijakan)	Jumlah kebijakan tim SPBE			1		1		Pusdatin	Pusdatin dan Biro SDMOT
				Peningkatan penerapan Layanan Publik Berbasis SPBE	(Dokumen/kebijakan)	Jumlah kebijakan tim SPBE			1		1		Pusdatin	Pusdatin dan Biro SDMOT
				Penyusunan dokumen manajemen SPBE	(Dokumen/kebijakan)	Jumlah kebijakan tim SPBE			2		2		Pusdatin	Pusdatin dan Biro SDMOT



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi	
A. Mandatory															
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	81	Review dan revisi target kinerja pada renstra eselon I	Dokumen	Jumlah dokumen hasil review			6		6	Rp3.500.000	Biro AKRB	Seluruh unit kerja	
				Penyusunan renstra perubahan berdasarkan hasil review	Persen	Persentase hasil review yang ditindaklanjuti				100	100	Rp20.000.000	Biro AKRB	Seluruh unit kerja	
				Memastikan perumusan kinerja individu telah mendukung kinerja organisasi	Persen	Persentase SKP disusun sesuai matriks peran hasil			100		100	-	Biro AKRB	Seluruh unit kerja	
				Optimalisasi dialog kinerja pada SIKT	Persen	Persentase pemanfaatan fitur dialog kinerja untuk pemberian <i>feedback</i> pencapaian kinerja pada SIKT					80	80	Rp3.500.000	Biro AKRB & Biro Renkeu	Seluruh unit kerja
				Revisi petunjuk teknis evaluasi SAKIP untuk mendorong kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	pedoman	Jumlah pedoman revisi petunjuk teknis evaluasi SAKIP		1				1	-	Inspektorat	Inspektorat
				Monitoring tindak lanjut rekomendasi SAKIP 2022 untuk mendorong kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dokumen	Jumlah dokumen hasil monitoring rekomendasi SAKIP 2022		6				6		Inspektorat	Inspektorat
5	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.3	Bimtek penilaian risiko level strategi	Kegiatan	Terlaksanannya Kegiatan Bimtek					1	1	Rp15.000.000	Inspektorat	Seluruh unit kerja
				Melakukan Reviu atas Pelaksanaan Penanganan Risiko Tahun 2022 dan Pemutakhiran Register Risiko (RR), serta Rencana Penanganan Risiko (RPR) tahun 2023 pada Unit Kerja	Dokumen	Laporan Hasil Reviu				3	3	Sampling Unit Kerja			
				Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Dokumen	Laporan Hasil Reviu	1				1	Tim PIPK			



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi
A. Mandatory														
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	Penyusunan dan Penetapan Kepseskab tentang Rencana Aksi SP4N Lapor! Sekretariat Kabinet Tahun 2023-2024	Dokumen	Kepseskab Rencana Aksi SP4N Lapor Setkab 2023-2024			1		1		Asdep Humaspro DKK	Tim Kepseskab 80/2019
				Perubahan Kepseskab No.80 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Dokumen	Draft Kepseskab Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Setkab				1	1			
				Diseminasi fitur/ aplikasi SP4N-LAPOR! melalui media sosial, website, dan elektronik Sekretariat Kabinet	Laporan	Diseminasi fitur/ aplikasi SP4N-LAPOR!				1	1			
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi tahunan terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik Sekretariat Kabinet	Laporan	Kegiatan Monev				1	1			
				Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Sekretariat Kabinet	Laporan	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Monev				1	1			
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	86	Koordinasi terkait SPI dengan unit kerja	Kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi		1			1	Rp3.500.000	Inspektorat	Inspektorat
				Kampanye Antikorupsi	Artikel	Publikasi di Website Setkab		1			1			
				Sosialisasi terkait SPI kepada stakeholder internal (melalui Bestie)	Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi SPI melalui Webinar Bestie		1			1			
				Monitoring pelaksanaan SPI	Dokumen	Terpenuhinya Data Pupulasi SPI Sekretariat Kabinet		1			1			



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi	
A. Mandatory															
8	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	66	Pemenuhan dan Optimalisasi Penerapan Kebijakan/Pedoman Kearsipan	Dokumen	Tersusunnya konsepsi, rancangan (outline) dan bagan sandingan, Draf kebijakan yang disetujui, dan laporan	3		2	1	6		Pusdatin dan Biro SDMOT	Pusdatin & Unit Pengolah (Unit Kerja)	
				Penyusunan dan Penetapan Program Arsip Vital	Laporan	Penetapan program dan laporan sosialisasi kearsipan		1			1		Pusdatin dan Biro SDMOT	Pusdatin & Unit Pengolah (Unit Kerja)	
				Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi	1	1	1	1	4		Pusdatin dan Biro SDMOT	Pusdatin & Unit Pengolah (Unit Kerja)	
					Piagam	Jumlah piagam penghargaan kepada unit kerja		5			5		Pusdatin	Pusdatin	
				Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dinamis	Dokumen	Jumlah dokumen laporan	1	1	1	1	4		Pusdatin dan Biro SDMOT	Pusdatin & Unit Pengolah (Unit Kerja)	
				Pelestarian arsip negara Tahun 2013	Dokumen	Jumlah dokumen laporan				1	1		Pusdatin	Pusdatin & Unit Pengolah (Unit Kerja)	
				Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	Dokumen	Terlaksananya penerapan SRIKANDI untuk penerimaan dan pengiriman naskah dinas antar K/L					1	1		Pusdatin	Pusdatin & Unit Pengolah (Unit Kerja)
				Pengolahan SIKN/JIKN	Dokumen	Terlaksananya kontribusi Setkab dalam SIKN/JIKN untuk penyebarluasan informasi					1	1		Pusdatin	Pusdatin
9	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	60	Usulan Penambahan jumlah Jabfung pengadaan	Dokumen	Tersampainya usulan penambahan jabfung PBJ ke LKPP		1			1		Biro SDMOT	Bagian Pengadaan, Biro Umum	
				Peningkatan level kematangan UKPBJ	Dokumen	Meningkatnya level kematangan UKPBJ (9/9)				1	1		Bagian Pengadaan, Biro Umum	Bagian Pengadaan, Biro Umum	
				Penerapan aplikasi Toko Daring melalui penyusunan surat edaran dan sosialisasi	Dokumen	Terlaksananya penerapan aplikasi Toko Daring melalui sosialisasi				1	1		Bagian Pengadaan, Biro Umum	PPK seluruh unit kerja dna Pengelola Pengadaan	



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi	
A. Mandatory															
10	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Melaksanakan Pendampingan Pelaksanaan Opname Fisik Persediaan	Dokumen	Laporan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Opname Fisik			1	1	2		Inspektorat	Seluruh unit kerja	
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)	95	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan capaian output melalui monev bulanan	Dokumen	Jumlah dokumen memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada unit kerja terkait monev capaian output	1	3	3	3	10		Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh unit kerja	
				Meningkatkan kompetensi Pengelola Keuangan melalui penyelenggaraan sosialisasi dan keikutsertaan dalam diklat terkait pengelolaan keuangan	Kegiatan	Jumlah sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bagi pengelola keuangan	1	2	2	1	5		Biro Perencanaan dan Keuangan	Pengelola Keuangan	
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)	3.6	Meningkatkan kompetensi pengelola aset	Kegiatan	Meningkatnya kompetensi pengelola aset melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh			1		1			Biro SDMOT	Bagian BMN, Biro Umum
				Melakukan rekonsiliasi data BMN setiap bulan	Dokumen	Tersajinya neraca laporan bmn dan laporan keuangan yang sama	3	3	3	3	12		Bagian BMN, Biro Umum	Bagian BMN, Biro Umum	
11	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	Melakukan alih tugas Pegawai yang memenuhi syarat menjadi Jabatan Fungsional	Dokumen	Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional			1	1	2	Rp40.000.000	Biro SDMOT	Biro SDMOT	
12	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	100%	Menyusun kebijakan penerapan manajemen talenta	Dokumen	Kebijakan manajemen talenta				1	1		Biro SDMOT	Biro SDMOT	
				Melakukan integrasi sistem informasi terkait pengelolaan kepegawaian (SIMPEG, Presensi Online, JP Diklat, E-Kinerja, SIKT)	Aplikasi	Progres integrasi aplikasi (SIMPEG, Presensi Online, JP Diklat, E-Kinerja, SIKT)				1	1		Biro SDMOT	Biro SDMOT	



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi
A. Mandatory														
13	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	Sosialisasi dan Bimtek terkait sistem ekinerja	Dokumen	Kegiatan Sosialisasi/ Jumlah laporan kegiatan yang disusun	1				1	Rp78.207.000	Biro AKRB	seluruh unit kerja
				Tingkat pemahaman pegawai terhadap kebijakan pengelolaan kinerja ASN yang berlaku	Persen	Persentase tingkat pemahaman pegawai terhadap kebijakan pengelolaan kinerja ASN yang berlaku				75	75			
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	329	Menindaklanjuti indikator penilaian sistem merit (melaksanakan penilaian kinerja (SKP dan Perilaku Kerja) pegawai secara objektif, terukur, dan sistematis disertai proses dialog kinerja	Dokumen	Pelaksanaan SKP yang disertai proses dialog kinerja				1	1		Biro SDMOT	Biro SDMOT
				Melakukan integrasi sistem informasi terkait pengelolaan kepegawaian (SIMPEG, Presensi Online, JP Diklat, E-Kinerja, SIKT)	Aplikasi	Progres integrasi aplikasi (SIMPEG, Presensi Online, JP Diklat, E-Kinerja, SIKT)				1	1		Biro SDMOT	Biro SDMOT
				Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait	Dokumen	Hasil koordinasi				1	1		Biro SDMOT	Biro SDMOT
				Pemanfaatan ekinerja untuk monev kinerja dan pelaporan kinerja pegawai secara berkala	Persen	Persentase JPT melakukan monev secara berkala melalui ekinerja				100	100		Biro SDMOT	Biro SDMOT
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	100%	melakukan sosialisasi / internalisasi core value ASN kepada seluruh pegawai	Dokumen	Sosialisasi				1	1	Rp34.950.000	Biro SDMOT	Biro SDMOT



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		PIC	Lokus Implementasi	
A. Mandatory															
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	Pelaksanaan SKM sebanyak 2 kali dalam setahun	Laporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan SKM	1		1		2	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	- Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan - Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan - Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol		
				Diseminasi hasil SKM pada website setkab.go.id	Laporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan SKM yang didiseminasikan pada website setkab.go.id	1		1		2				
				Menindaklanjuti saran dan masukan SKM	Laporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan SKM - terdapat tindak lanjut atas seluruh saran dan masukan SKM	1		1		2				
			90	Meningkatkan Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Diklat	Jumlah laporan	1	2	1	1	5			Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah	Pejabat/Pegawai Pusat Pembinaan Penerjemah
				Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Jabatan Fungsional	Kegiatan	Laporan hasil koordinasi	1	1	1	1	4				
				Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah	Kegiatan	Jumlah laporan				1	1				
		Menindaklanjuti saran dan masukan responden		Kegiatan	Laporan hasil kegiatan	5	2	5	4	16					
		Indeks Pelayanan Publik	4.55	Meningkatkan koordinasi dengan seluruh unit pelayanan setkab	Kegiatan	Hasil koordinasi	1	1	1	1	4	Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah	Pejabat/Pegawai Pusat Pembinaan Penerjemah		
				Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Diklat	Jumlah laporan	3	2	1	1	7				
				Meningkatkan Fasilitas Pelayanan	Unit Layanan	Jumlah Fasilitas	1	1	4	2	8				
Menindaklanjuti saran dan masukan responden	Kegiatan			Laporan hasil kegiatan	5	2	5	4	16						



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2023

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi	
									Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			PIC	Lokus Impementasi
Inflasi				Belum tersedianya sarana terpadu dalam memonitor perkembangan indikator-indikator perekonomian nasional terutama terkait dengan perkembangan laju inflasi	Tersedianya aplikasi yang berisi data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	Jumlah aplikasi yang menyediakan data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	1 Unit	Pembangunan aplikasi Sekretariat Kabinet <i>economic surveillance</i> yang menyediakan akses dalam jaringan bagi Presiden dan Sekretaris Kabinet sebagai sarana monitoring terkait perkembangan laju inflasi	Unit	Jumlah aplikasi yang dibangun			1		1 Unit Aplikasi	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	- (Bekerja sama dengan Pusdatin)	Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
				Tersedianya laporan data Inflasi berdasarkan data indikator-indikator perekonomian terkini	Jumlah laporan data inflasi berdasarkan data indikator-indikator perekonomian terkini	8 Laporan	Penyusunan laporan perkembangan inflasi secara berkala	Laporan	Jumlah laporan yang disampaikan kepada Presiden	2	2	2	2	8 Laporan	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	Rp81.240.000	Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha	
Investasi				Nilai realisasi investasi tahun 2023 perlu ditingkatkan dari capaian sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp.1.207 triliun, menjadi Rp.1.400 triliun pada tahun 2023, guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3 persen. Untuk itu, guna mendukung Pencapaian Target Realisasi Investasi Nasional Tahun 2023, perlu diselesaikan berbagai hambatan yang berpotensi menurunkan minat investor untuk masuk ke Indonesia.	Terwujudnya rekomendasi atas upaya penyelesaian hambatan investasi, dalam hal ini permasalahan dari sisi regulasi, khususnya yang mengatur terkait implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal bagi daerah	Persentase rekomendasi kebijakan atas upaya penyelesaian hambatan investasi yang ditindaklanjuti	100%	Melakukan kegiatan pemantauan (monev) ke daerah, guna menggali dan identifikasi berbagai hambatan dalam implementasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di daerah	Laporan	Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan			1		1 Laporan	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	Rp60.000.000	Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi ¹⁾	Jumlah Anggaran	PIC/Lokus Implementasi	
									Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			PIC	Lokus Impementasi
								Rapat koordinasi dengan K/L terkait, guna finalisasi rekomendasi atas penyelesaian hambatan atas implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di daerah Penyusunan rekomendasi kebijakan atas penyelesaian hambatan dalam implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di daerah Monitoring terhadap tindak lanjut K/L terkait atas rekomendasi kebijakan penyelesaian hambatan dalam implementasi DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal bagi daerah, yang telah disampaikan kepada K/L	Rekomendasi Kebijakan	Laporan Rapat Koordinasi penyusunan Rekomendasi Kegiatan			1		1 Rekomendasi Kebijakan	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)			
									Laporan				1	1 Laporan					
Kemiskinan	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait pengentasan kemiskinan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	100%	Meningkatnya kemiskinan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas terkait pengentasan kemiskinan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang mengalami hambatan	100%	Penyusunan kajian terkait pengentasan kemiskinan Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan	Rekomendasi Kebijakan	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang mengalami hambatan	-	1	-	1	2 Rekomendasi	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	Rp97.929.000,-	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG